

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TERHADAP PDRB KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
stratasatu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

SKRIPSI



OLEH :

**SITI PRI UTAMI
1107750**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PDRB DI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nama : Siti Pri Utami
NIM/BP : 1107750 / 2011
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2018

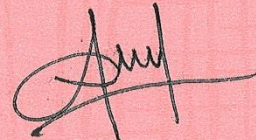
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. Ali Anis, MS
NIP. 195911291986021001

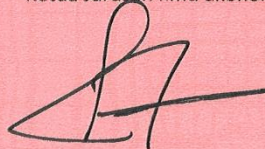
Pembimbing II



Ariusni, SE, M.Si
NIP. 197703092008012001

Disetujui Oleh:

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Drs. Ali Anis, MS
NIP. 195911291986021001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

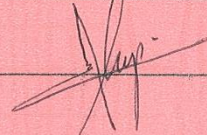
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PDRB DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nama : Siti Pri Utami
NIM/BP : 1107750 / 2011
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2018

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Drs. Ali Anis, M.S	1. 
2.	Sekretaris	: Ariusni, SE, M.Si	2. 
3.	Anggota	: Drs. Zul Azhar, M.Si	3. 
4.	Anggota	: Dr. Alpon Satrianto, SE, ME	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI PRI UTAMI
NIM/Tahun Masuk : 1107750/2011
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/ 25 Februari 1994
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Perencanaan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln. Bhakti Abri no 3 Lubuk Minturun, Padang
No. HP/telp. : 085272365188
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terhadap Perekonomian di Kabupaten Pesisir Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar yang diperoleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, 6 Februari 2018
Yang Menyatakan



SITI PRI UTAMI
NIM. 1107750

ABSTRAK

Siti Pri Utami, (2011/1107750) : Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan. Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Di Bawah Bimbingan Bapak H.Ali Anis, MS dan Ibu Ariusni, SE,M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah di Kabupaten Pesisir Selatan.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data BPS 1983-2015. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Data-data yang diolah dan diambil dari kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Subjek penelitian adalah seluruh data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara parsial (1) pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan ($\text{prob} = 0,01 < \alpha = 0,05$) terhadap PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan, (2) retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan ($\text{prob} = 0,02 < \alpha = 0,05$) terhadap PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan, (3) pendapatan lain-lain yang sah berpengaruh negatif dan tidak signifikan ($\text{prob} = 0,12 > \alpha = 0,05$) terhadap PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan (4) secara bersama-sama pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dari hasil penelitian ini, maka disarankan kepada pemerintah hendaknya lebih dapat memberikan dana kepada daerah-daerah yang membutuhkan, sehingga dapat meningkatkan PDRB serta tetap mengoptimalkan dalam menaikkan PAD seiring dengan semakin tingginya pembiayaan dan pembelanjaan daerah sehingga perlu upaya peningkatan pendapatan agar keuangan daerah terus membaik.

Kata kunci : pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.

ABSTRACT

Siti Pri Utami, (2011/1107750): Analysis of the Effect of Local Original Income on GDRB in Pesisir Selatan Regency. Economic Development Study Program, Faculty of Economics, State University of Padang. Under the Guidance of Mr. H.Ali Anis, MS and Mrs. Ariusni, SE, M.Si

This study aims to analyze the influence of local taxes, retributions and other legitimate income in Pesisir Selatan Regency. This type of research includes quantitative research. This research uses BPS 1983-2015 data. Research subjects in this study is the Office of Revenue Service Financial Management and Asset Regional Pesisir Selatan Regency. The data is processed and taken from the office of Revenue Management Department of Finance and Asset Area of Pesisir Selatan Regency. The research subject is all data of Regional Tax, Local Retribution and Revenue of Regency of South Pesisir Regency. The result of research shows that partially (1) local tax has positive and significant influence ($\text{prob} = 0,01 < \alpha = 0,05$) to GDRB in Pesisir Selatan Regency, (2) levies have positive and significant influence ($\text{prob} = 0,02 < \alpha = 0,05$) to GDRB in Pesisir Selatan Regency, (3) other legitimate income has negative and insignificant effect ($\text{prob} = 0,12 > \alpha = 0,05$) to GDRB in Pesisir Selatan Regency (4) together with local taxes, regional levies and other legitimate income have a significant effect on the GDRB in Pesisir Selatan Regency. From the results of this study, it is advisable to the government should be more able to provide funds to areas in need, so as to increase GDRB and still optimize in increasing the PAD along with the increasing financing and regional expenditure so that efforts need to increase revenues for local finance continue to improve.

Keywords: local taxes, user charges, and other legitimate income.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, walaupun dengan kesederhanaan dan keterbatasan yang ada dengan judul **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Perekonomian di Kabupaten Pesisir Selatan”**.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Disamping itu juga untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan untuk menjadikan penulis sebagai orang yang dapat berguna bagi masyarakat.

Dalam Penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan serta kemudahan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada kedua orang tua Penulis, yang selama ini telah memberikan dorongan, semangat serta Doa demi kelancaran penulisan ini. Selain itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. AliAnis, M.S selaku pembimbing I dan Ibuk Ariusni, SE, MSi selaku pembimbing II yang telah menuntun serta membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Bapak Dr. H. Idris, M.Si serta para Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Drs. Alianis, M.Si selaku Ketua Program Studi dan Ibu Melti Roza Ardy, SE, ME selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Kepada Bapak Drs.Zul Azhar, ME dan Bapak Dr. Alpon Satrianto, SE. ME yang telah bersedia menguji dan memberikan masukan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha yang memberikan kelancaran serta Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang memberikan penulis kemudahan dalam mendapatkan bahan bacaan.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Sumatera Barat yang telah membantu kelancaran bagi penulis dalam mendapatkan data yang dibutuhkan bagi penyelesaian skripsi ini.
7. Rekan – rekan seperjuangan Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang angkatan 2011 yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan teristimewa penulis persembahkan kepada Mami dan Papi Tercinta beserta Adik-Adik yang sangat penulis sayangi dimana telah banyak memberikan kesungguhan Do'a dan bantuan Moril serta materil pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Terimakasih banyak buat Raindy yang selalu memberikan support dan banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Love u :*

10. Kepada sahabat-sahabat penulis yaitu D*Aroes dan kepada Rani, Vinni, dan Denza terimakasih banyak

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Amin.

Padang, Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUALDAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	8
B. Penelitian Terdahulu.....	28
C. Kerangka Konseptual.....	30
D. Hipotesis	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Subjek Penelitian	32
C. Jenis dan Sumber Data.....	32
D. Definisi Operasional	33
E. Model Analisis Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil penelitian	39
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	39
a. Letak, Luas dan Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.....	39
b. Penduduk.....	40
2. Deskripsi Variabel Penelitian.....	41
a. PDRB..	41
b. Pajak Daerah	43
c. Retribusi Daerah.....	45
d. Pendapatan Lain-Lain Yang Sah.....	47
3. Hasil Analisis Induktif	51
a. Regresi Linier Berganda	51
b. Uji Asumsi Klasik.....	52
1) Uji Normalitas	52
2) Uji Autokorelasi	53
3) Uji Heterokedastisitas.....	54
4) Uji Multikolinieritas.....	55
5) Uji Linier Berganda.....	56
6) Analisis Determinasi.....	58
B. Pembahasan	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015	3
Tabel 2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2009-2013.....	4
Tabel 3 Pajak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2009-2013	5
Tabel 4 Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2009-2013 ...	5
Tabel 5 Pendapatan Lain-lain yang Sah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2009-2013	6
Tabel 6 Luas Daerah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014	42
Tabel 7 PDRB Kabupaten Pesisir Selatan tahun 1983-2015	44
Tabel 8 Pajak Daerah dan Laju pertumbuhan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 1983-2015.....	46
Tabel 9 Retribusi Daerah dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 1983-2015.....	48
Tabel 10 Pendapatan Lain-lain Yang Sah dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 1983-2015.....	51
Tabel 11 Hasil Estimasi Uji Autokorelasi.....	55
Tabel 12 Hasil Estimasi Uji Heteroskedastisitas.....	57
Tabel 13 Hasil Estimasi Uji Multikolinieritas.....	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Konseptual Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan.....	30
Gambar 2 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	53
Gambar3 Hasil Estimasi Normalitas	54

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Analisis Linier Berganda.....	74
Lampiran 2	Data Mentah.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (Undang-Undang No 32 Tahun 2004). Menurut Nurcholis (2007:182) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Citra keuangan pemerintah daerah tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan Pemda

untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah.

Dukungan pemerintah yang diharapkan untuk mendorong investasi swasta di bidang penelitian dan pengembangan diwujudkan antara lain dalam bentuk pemberian insentif fiskal yang memberikan kemudahan serta keringanan pajak dalam berbagai skema. Selain itu, dukungan pemerintah juga dapat diberikan dalam bentuk bantuan langsung (hibah) bagi lembaga yang melaksanakan penelitian dan pengembangan dengan menjalin kemitraan dengan pihak swasta. Keterlibatan dan peran aktif pemerintah tersebut diharapkan dapat berperan sebagai katalisator dalam menggerakkan pertumbuhan inovasi dan memajukan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah bagi yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian dalam jangka panjang dan merupakan fenomena penting yang dialami dunia belakangan ini. Salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Terjadinya kenaikan atau penurunan PDRB mengindikasikan terjadinya kenaikan atau penurunan dalam proses produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah. Oleh Karena itu, PDRB dapat

dijadikan salah satu indikator keberhasilan ekonomi suatu daerah. PDRB Kabupaten Pesisir Selatan seperti tabel 1:

Tabel 1
PDRB Harga Konstan 2010 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2016

Tahun	PDRB Harga Konstan 2010 (Rupiah)
2010	5.894.434.170
2011	6.234.822.380
2012	6.597.446.100
2013	6.986.968.480
2014	7.392.536.440
2015	7.816.214.050

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015

Tabel 1 memperlihatkan bahwa tingkat PDRB kabupaten Pesisir Selatan dalam 6 tahun terakhir cukup bagus karena terus meningkat setiap tahunnya.

Tabel 2
Pendapatan Asli Daerah (Rupiah) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010-2015

Tahun	Target	Realisasi
2010	22.480.000.000	17.621.920,410
2011	38.286.012.620	30.280.287.060
2012	36.322.932.000	40.254.534.890
2013	46.674.846.000	47.626.528.000
2014	81.945.822.130	86.699.821.740
2015	426.662.085.240	447.019.457.660

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015

Tabel 2 memperlihatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Selatan cenderung terealisasi dari tahun 2010 – 2015, kecuali tahun 2010 dan 2011. Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang dianggap sah.

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara bersama-sama menjadi komponen PAD. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang utama dan sangat penting bagi pemerintah daerah. Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota seperti table 3:

Tabel 3
Pajak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Tahun 2010-2015

Tahun	Pajak Daerah (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2010	4.163.642.810	3,9
2011	6.628.723.640	38,2
2012	7.026.453.240	6
2013	12.418.256.000	25,1
2014	15.042.795.100	21,1
2015	14.420.466.230	63,7

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015

Tabel 3 memperlihatkan bahwa pajak daerah kabupaten Pesisir Selatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kecuali tahun 2015. Pajak daerah merupakan salah satu unsur pembentuk PAD. Data di atas juga menunjukkan bahwa pajak daerah Kabupaten Pesisir Selatan membaik mulai tahun 2011, karena meningkat 38,2 % .Pertumbuhan penerimaan pajak daerah secara umum positif, karena mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Retribusi daerah kabupaten Pesisir Selatan seperti tabel 4

Tabel 4
Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Tahun 2010-2015

Tahun	Retribusi Daerah (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2010	3.611.880.410	-3,8
2011	4.731.304.480	31
2012	6.482.533.380	37
2013	19.977.767.000	20,2
2014	43.132.513.940	15,9
2015	61.950.332.700	43,6

Tabel 4 memperlihatkan bahwa realisasi retribusi daerah Kabupaten Pesisir Selatan cukup bagus karena selalu meningkat setiap tahun nya sehingga berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Pesisir Selatan. Pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikatakan meningkat, terjadi pertumbuhan negatif pada tahun 2010

dan meningkat secara signifikan tahun 2015 sebesar 43,6%. Hal ini tentu mengurangi target PAD yang telah ditetapkan.

Faktor selanjutnya yang menentukan besarnya PAD adalah pendapatan lain-lain yang sah. Hal ini terlihat pada tabel 5:

Tabel 5
Pendapatan Lain-lain yang Sah Kabupaten Pesisir Selatan tahun
Tahun 2010-2015

Tahun	Pendapatan lain-lain (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2010	7.438.691.640	-2,2
2011	14.;926.878.970	30,7
2012	22.998.414.520	54,1
2013	171.510.028.000	45,7
2014	202.129.657.110	17,9
2015	338.453.913.870	67,4

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015

Tabel 5 memperlihatkan bahwa pendapatan asli daerah yang berasal dari pendapatan lain-lain yang sah, pertumbuhannya selalu berfluktuasi setiap tahun. Tahun 2010 mengalami pertumbuhan negatif dan tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang sangat besar yaitu 67,4 %. Hal ini tidak terlepas dari pendapatan asli daerah yang berasal dari pendapatan lain-lain yang sah yang tidak dapat diprediksi jumlah dan sumbernya, karena berasal dari berbagai sumber yaitu hibah dari pemerintah pusat, dana darurat, dana bagi hasil pajak serta dana penyesuaian otonomi daerah.

Dari penjelasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Seberapa besar pengaruh retribusi daerah terhadap PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Seberapa besar pengaruh pendapatan lain-lain terhadap PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh retribusi daerah terhadap PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pendapatan lain-lain terhadap PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta menambah wawasan penulis dalam pembuatan karya ilmiah.
2. Sebagai pengembangan ilmu ekonomi pembangunan khususnya tentang pengaruh PAD terhadap perekonomian daerah.

3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji masalah yang sama dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro suatu daerah, yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Dengan menghitung PDRB secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan di suatu daerah, yang memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi yang mewakili peningkatan produksi di berbagai sektor lapangan usaha yang ada (Kuncoro, 2004:115).

PDRB juga merupakan jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah itu sama dengan pertumbuhan PDRB di wilayah tersebut (BPS, 2011).

Pada perhitungan PDRB dapat menggunakan dua harga yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan, yang dimana PDRB harga berlaku merupakan nilai suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun tersebut dan PDRB harga konstan adalah nilai suatu barang dan jasa dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun acuan atau tahun dasar. PDRB digunakan untuk berbagai tujuan tetapi yang terpenting adalah untuk mengukur kinerja perekonomian secara keseluruhan. Jumlah ini akan sama dengan jumlah nilai nominal

Dalam menghitung PDRB dapat dilakukan dengan empat pendekatan antara lain :

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini sering disebut juga pendekatan nilai tambah dimana nilai tambah bruto dengan cara mengurangi nilai output yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara lain dari masing-masing nilai produksi bruto dari setiap sektor ekonomi, nilai tambah ini merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang diperoleh oleh unit produksi sebagai input antara, nilai yang ditambahkan sama dengan balas jasa faktor produksi atas keikutsertaannya dalam proses produksi.

2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini merupakan nilai tambah dari kegiatan –kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan, surplus usaha seperti bunga neto, sewa tanah dan keuntungan tidak diperhitungkan.

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat untuk kepentingan konsumsi rumah tangga, pemerintah dan yayasan sosial, pembentukan modal dan ekspor, nilai barang dan jasa hanya berasal dari produksi domestik, total pengeluaran dari komponen –komponen tersebut harus dikurangi nilai impor sehingga nilai ekspor yang dimaksud adalah ekspor neto, penjumlahan seluruh komponen pengeluaran akhir ini disebut PDRB atas dasar harga pasar.

4. Metode Alokasi

Metode alokasi digunakan pada data data suatu unit produksi di suatu daerah tidak tersedia. Nilai tambah dari suatu unit produksi di daerah tersebut dihitung dengan

menggunakan data yang telah dialokasikan dari sumber yang ditingkatnya lebih tinggi, seperti data suatu kabupaten diperoleh dari alokasi data provinsi.

Untuk menghitung produk domestik regional bruto(PDRB) dapat digunakan salah satu dari penghitungan pendapatan nasional yaitu dengan pendekatan pengeluaran.pendekatan pengeluaran digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang dikeluarkan oleh berbagai golongan dalam masyarakat, dengan persamaan sebagai berikut:

$$PDRB = C + I + G + (x - m) \dots\dots\dots (1)$$

Dimana :

C = pengeluaran konsumsi rumah tangga,

I= pembentukan modal,

G = pengeluaran pemerintah,

(x -m) = selisih nilai ekspor dan impor

Perlu disepakati bahwa I(investasi) dalam bidang produktif, sebenarnya terdiri dari investasi swasta (ip) dan investasi pemerintah (ig). Gadalah pengeluaran pemerintah pada umumnya yaitu pengeluaran rutin pemerintah dan pengeluaran pembangunan di luar bidang produktif.Untuk mengukur pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah dapat diketahui melalui pendekatan model pertumbuhan neo klasik dengan memusatkan perhatian pada fungsi produksi cobb-douglas.

Menurut Arsyad (1999) fungsi produksi cobb-douglastersebut dapat dituliskan dengan cara berikut:

$$Y = AL^{\alpha} K^{\beta} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

Y = total produksi,

L = tenaga kerja,

k = modal,

A = produktivitas faktor total,

α dan β adalah elastisitas output dari tenaga kerja dan modal, masing-masing. Nilai-nilai konstan ditentukan oleh teknologi yang tersedia.

Dalam penghitungan PDRB, seluruh lapangan usaha dikelompokkan menjadi sembilan sektor ekonomi. Ini sesuai dengan pembagian yang digunakan dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) ditingkat nasional. Pembagian ini sesuai dengan System of National Accounts (SNA). Hal ini juga memudahkan para analis untuk membandingkan PDRB antar provinsi dan antara PDRB dengan PDB.

a. Teori Keynes

Pada Teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal. Ketika Great Depression melanda, masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanja dan cenderung menimbun uangnya. Hal ini berdasarkan Teori Keynes akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya membuat perekonomian lumpuh.

Produk Domestik Bruto (Y) adalah jumlah nilai seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan tiga macam pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Dari segi pendekatan pengeluaran, Pendapatan Nasional adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor di dalam suatu negara. Sektor-sektor tersebut adalah sektor rumah tangga, sektor badan usaha, sektor pemerintahan dan sektor perdagangan internasional. Pengeluaran sektor rumah tangga dicerminkan oleh konsumsi masyarakat (C), pengeluaran sektor badan usaha dicerminkan

oleh investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan (**I**), pengeluaran sektor pemerintah dicerminkan oleh pengeluaran pemerintahan (**G**), sedangkan pengeluaran perdagangan dengan luar negeri tercermin dari selisih antara ekspor dan impor Negara yang bersangkutan (**X-M**).

Dalam bentuk persamaan yaitu :

$$Y = C + I + G + (X - M) \dots\dots\dots (3)$$

Dimana :

Y = PDRB

C = Konsumsi

I = Investasi

G = Pengeluaran pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

Analisa Pendapatan Nasional mempunyai 3 pendekatan model perekonomian yaitu:

1. Perekonomian 2 sektor (Rumah Tangga dan Badan Usaha)

$$Y = C + I$$

2. Perekonomian 3 sektor (Rumah Tangga, Badan Usaha, Pemerintah)

$$Y = C + I + G$$

Jumlah dari C, I dan G mencerminkan pembelian barang dan jasa oleh konsumsi rumah tangga, badan usaha dan pemerintah. Untuk menentukan pembelian barang dan jasa domestik, harus diketahui ekspor bersih atau net export yaitu dengan mengurangi Impor dan menambahkan Ekspor. Impor merupakan pembelian barang dan jasa dari luar negeri oleh konsumen dan perusahaan domestik, dan pemerintah. Ekspor merupakan pembelian barang dan jasa domestik oleh pihak asing.

3. Perekonomian 4 sektor (Rumah Tangga, Badan Usaha, Pemerintah, Perdagangan Internasional)

b. Pemerintah dalam perekonomian

Semua pendapatan yang dihasilkan dalam perekonomian dibelanjakan atau ditabung oleh rumah tangga. Sewaktu Pendapatan (Y) mengalir menuju rumah tangga, pemerintah mengambil pendapatan dari rumah tangga dalam bentuk Pajak netto (T). Pendapatan yang akhirnya sampai pada rumah tangga disebut Pendapatan siap konsumsi (disposable income) atau pendapatan setelah pajak (after-tax income) (Yd).

$$Yd = Y - T \dots\dots\dots (4)$$

Dimana :

Yd = Pendapatan setelah pajak

Y = Pendapatan

T = Pajak

Yd mengecualikan pajak yang dibayar oleh rumah tangga dan memasukkan pembayaran transfer yang digunakan rumah tangga oleh pemerintah. Pendapatan siap konsumsi (Yd) dari rumah tangga harus berakhir pada konsumsi (C) atau tabungan (S). Jadi,

$$Yd = C + S \dots\dots\dots (5)$$

Karena pendapatan siap konsumsi adalah pendapatan agregat (Y) dikurangi pajak netto (T) maka dapat dilihat :

$$Y - T = C + S \dots\dots\dots (6)$$

Dengan menambahkan T di kedua sisi :

$$Y = C + S + T \dots\dots\dots (7)$$

Dimana :

Y = Pendapatan

C = Konsumsi

S = Tabungan

T = Pajak

Identitas ini mengatakan bahwa pendapatan agregat terbagi atas tiga bagian.

Pemerintah mendapatkan satu bagian (Pajak neto, T) lalu rumah tangga membagi sisanya antara konsumsi (C) dan tabungan (S)

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah/ hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Mardiasmo (2002), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Optimalisasi dalam penerimaan PAD hendaknya di dukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro.

PAD sebagai sumber utama penghasilan bagi daerah. PAD terbagi menjadi tiga kategori, yaitu pajak daerah, denda dan pungutan, serta penghasilan perusahaan daerah. Ketiga kategori tersebut tercantum dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah yang menjadi sorotan publik yang dipandang sebagai jenis penghasilan utama

yang diperoleh daerah. Pada umumnya, pemerintah pusatlah yang akan menentukan pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

Kategori kedua dari Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan biaya, denda, dan lisensi. Sumber pendapatan ini terikat dengan seseorang untuk membayar pelayanan tertentu yang dipergunakannya. Pemerintah daerah memungut biaya atas pelayanan dan lisensi yang sudah disediakan. Contohnya yang dalam kategori ini adalah retribusi parkir dan lain sebagainya (Siahaan, 2006:16).

Kategori ketiga dari Pendapatan Asli daerah penghasilan dari utilitas dan perusahaan daerah. Perusahaan daerah mendapatkan penghasilan melalui pembebanan biaya atas barang maupun jasa yang ditawarkannya. Pada prinsipnya pembebanan wilayah ini memainkan peran fiskal dan regulasi berupa pengumpulan pendapatan dan mengatur permintaan jasa dengan meminimalisasi pelanggaran yang sering terjadi dalam pelayanan publik yang bebas biaya. Regulasi tersebut dilakukan untuk menghindari penggunaan tanpa batas secara bebas terhadap fasilitas umum. Oleh karena itu, melakukan sistem bagi hasil dengan pemerintah daerah dalam bentuk presentase tertentu untuk menggunakan atau mengelola kekayaan daerah (Siahaan, 2006:16).

Pada umumnya, perusahaan daerah bergerak di bidang pelayanan publik guna memberikan kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti penyediaan air, listrik, gas, transportasi umum, pemeliharaan jalan, serta pengolahan limbah cair dan sampah. Beberapa perusahaan milik daerah beroperasi untuk memperoleh pendapatan, perumahan, pelabuhan, bandara, dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan tersebut lebih berorientasi terhadap kepentingan publik daripada laba.

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

- 1) Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dll.
- 2) Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi Pelayanan Kesehatan, retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair, dll.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 4) Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll.

PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD dapat dijadikan sebagai indikator dalam

menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio PAD dibandingkan dengan total pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah (Mardiasmo, 2002:132),

a. Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2005: 10).

1. Jenis-jenis Pajak Daerah.

Jenis-jenis pajak yang dipungut di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- a.** Pajak hotel
- b.** Pajak restoran
- c.** Pajak hiburan
- d.** Pajak reklame
- e.** Pajak penerangan jalan umum
- f.** Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g.** Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

2. Objek Pajak Daerah.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 maupun Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tidak secara tegas dan jelas menentukan apa yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah, tetapi menyerahkannya pada peraturan pemerintah. Penentuan yang menjadi objek pajak daerah pada saat ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. Hal ini merupakan penentuan objek pajak secara umum, mengingat pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu

propinsi atau kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah untuk mengetahui apa yang menjadi objek pajak harus dilihat apa yang ditetapkan peraturan daerah dimaksud sebagai objek pajak (Siahaan, 2005:55).

3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah.

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain yang bukan merupakan subjek pajak, yang berwenang memungut pajak dari subjek wajib pajak (Siahaan, 2005: 56).

b. Retribusi Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Siahaan, 2006:431).

1. Jenis-Jenis Retribusi Daerah.

Menurut (Siahaan, 2005:437), jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

a) Retribusi Jasa Umum

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (3) Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (4) Retribusi Pelayanan Pasar.
- (5) Retribusi Parkir di tepi jalan Umum.
- (6) Retribusi Pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (7) Retribusi Penyediaan dan atau penyedotan kakus.
- (8) Retribusi tera ulang alat ukur timbang dan takar dan perlengkapannya.
- (9) Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi.

b) Retribusi Jasa Usaha

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (3) Retribusi Tempat khusus parkir.
- (4) Retribusi Terminal.
- (5) Retribusi pelayanan ke pelabuhan.
- (6) Retribusi rumah potong hewan.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- (1) Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

(3)Retribusi Izin Gangguan.

(4)Retribusi Izin Trayek.

(5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2. Objek Retribusi Daerah

Objek Retribusi Daerah menurut (Siahaan, 2005:434)terdiri dari:

- a) Jasa Umum yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b) Jasa Usaha yaitu berupa layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c) Perizinan Tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Subjek Retribusi Daerah

Menurut (Siahaan, 2005:438).subjek Retribusi Daerah adalah:

- (1)Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2)Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa usaha yang bersangkutan.
- (3)Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

4. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah.

Menurut (Siahaan, 2005:449).prinsip dan sasaran penetapan tarif setiap jenis Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- (1)Retribusi Jasa Umum berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuanmasyarakat, dan aspek keadilan.
- (2)Retribusi Jasa Usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3)Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

c. Lain-lain penerimaan daerah yang dianggap sah

Pendapatan lain-lainnya daerah yang sah merupakan penerimaan lain-lain yang bukan berasal dari klasifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Menurut jenisnya lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mencakup : a. Hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang danatau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali; b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam; c. Sumbangan pihak ketiga kepada Daerah; d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus. Bantuan keuangan dari pemerintah propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya (Undang-Undang No 33 tahun 2004).

Sedangkan di Kabupaten Pesisir Selatan yang termasuk pendapatan lain;lain yang sah adalah:

- a. Hasil penjualan peralatan dan mesin
- b. Penerimaan Jasa Giro

- c. Pendapatan Bunga Depito Bank
- d. Pendapatan BLUD

d. Fungsi Pemerintahan

Dibentuknya pemerintah pada awalnya adalah untuk melindungi sistem ketertiban di masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupan dengan tenang dan lancar. Dinamika di masyarakat memperluas fungsi dan peran pemerintahan tidak hanya sebatas pelindung melainkan pelayan masyarakat. Rakyat tidak lagi harus melayani pemerintah seperti zaman kerajaan ataupun penjajahan namun justru pemerintah yang seharusnya melayani, mengayomi, dan mengembangkan serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya sesuai tujuan negaranya. Van Poelje (dalam Hamdi, 1999 : 52) menjelaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum.

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah :

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

2. Hubungan Pajak Daerah terhadap PDRB

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2005: 67).

Pajak daerah merupakan fungsi dari PDRB, yaitu dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. Selanjutnya dengan bertambahnya penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Begitu juga sebaliknya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya.

Pajak daerah yang memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, Musgrave (2001) menyatakan bahwa ada tiga dasar basis pemungutan pajak pusat dan daerah. Dasar basis pemungutan pajak tersebut meliputi pajak daerah maupun pajak pusat yang berbasis pendapatan dan perusahaan (*income and corporate*), konsumsi (*consumption*), dan kekayaan (*wealth*).

3. Hubungan Retribusi Daerah terhadap PDRB

Hubungan antara retribusi daerah dengan pdrb seperti dikemukakan oleh Baihaqi (2011) peranan retribusi daerah bagi pendapatan daerah, pemerintah harus dapat melakukan berbagai cara dan strategi yang baik. Diantaranya adalah meningkatkan dan mengembangkan sarana, prasarana, dan pelayanan kepada masyarakat (publik), memberantas banyaknya pungutan liar yang dapat merugikan rakyat. Selain itu perludanya evaluasi secara berkelanjutan untuk dapat mengawasi jalannya proses pemungutan retribusi tersebut karena mungkin saja dana retribusi ini diselewengkan oleh

pihak-pihakpelaksana pemungutan retribusi sehingga dana retribusi yang masuk ke kas daerah menjadisangat kecil.

Hal ini menunjukkan bahwa salah satu sumberpendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan yang diperoleh tingkatpemerintahan lokal (Pemda) digali oleh pemerintah daerah dari sumber-sumberekonomi yang ada di daerahnya.Dalam konsep pendapatan asli daerahini tercakup komponen-komponen penerimaan yang berasal dari hasilperolehan pajak daerah, retribusi daerah, bagian daerah yang berasal dari labaBadan Usaha Milik Daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

4. Hubungan Pendapatan Lain- lain terhadap PDRB

Pendapatan lain-lainnya daerah yang sah merupakan penerimaan lain-lain yang bukan berasal dari klasifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.(Hirawan, 2005 : 208)

Hubungan antara pendapatan lain-lain dengan dengan PDRB bahwa pendapatan lain-lain yang sah berpengaruh signifikan positif terhadapbelanja daerah.Peningkatanlain-lain pendapatanyang sah akanmeningkatkan belanja daerah.Penerimaan dinas-dinas merupakan penerimaan yang berasal dari usaha dinas-dinas daerah yang bersangkutan yang bukan merupakan penerimaan pajak, retribusi ataupun laba perusahaan daerah.

Penerimaan lain-lain, di lain pihak adalah penerimaan pemerintah daerah di luar penerimaan-penerimaan dinas, pajak, retribusi dan bagian laba perusahaan daerah. Penerimaan ini antara lain berasal dari sewa rumah dinasmilik daerah, hasil penjualan barang-barang (bekas) milik daerah, penerimaan sewa kios milik daerah dan penerimaan uang langganan majalah daerah (Hirawan, 2005: 204).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Wenny, 2012 tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera

Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, artinya keseluruhan dari komponen PAD sangat mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Penelitian juga dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian Batubara, 2010 tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pengembangan Wilayah Kabupaten Toba Samosir. Dengan hasil penelitian, bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Samosir. Karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan dalam membiayai pembangunan daerah melalui APBD. Retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan bersifat meningkatkan PDRB kabupaten Toba Samosir.

Penelitian Prakarsa (2014) tentang Analisis Pengaruh PAD dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan hasil penelitian, bahwa PAD berpengaruh secara tidak signifikan dan berdampak secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Timur.

Penelitian Amelia (2008) tentang Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang. Dengan hasil penelitian bahwa Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang.

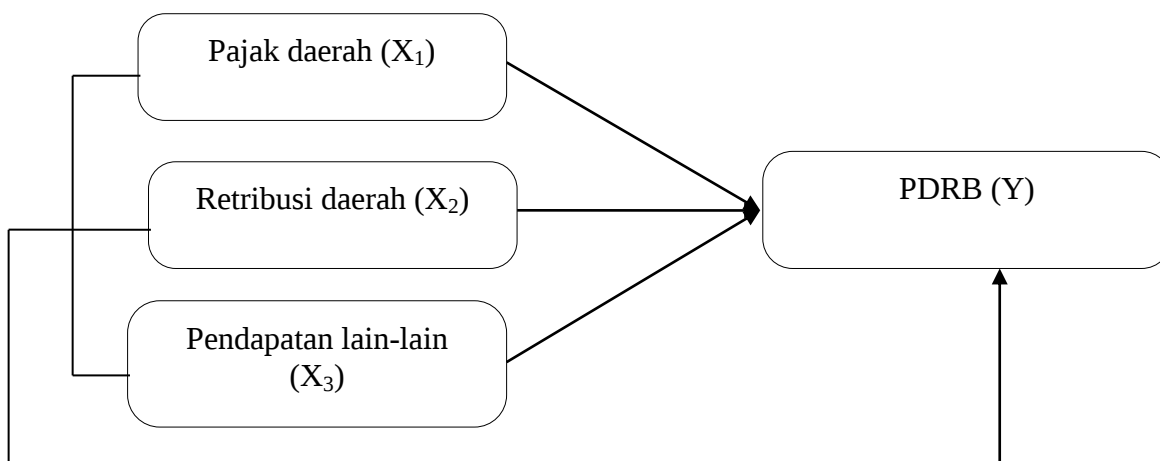
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah dari segi teknik analisis, dimana peneliti menggunakan teknik analisis regresi logistik, variabel yang digunakan, dan waktu maupun tempat penelitian juga berbeda dari yang sebelumnya.

C. Kerangka Konseptual

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak Daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pendapatan Lain-Lainnya daerah yang sah merupakan penerimaan lain-lain yang bukan berasal dari klasifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

Untuk mengetahui variabel penelitian lebih jelas, maka digambarkan kerangka konseptualnya pada gambar 1:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan

D. Hipotesis

1. Secara parsial, pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Secara parsial, retribusi daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDR B Kabupaten Pesisir Selatan.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Secara parsial, pendapatan lain mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDR B Kabupaten Pesisir Selatan.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

4. Secara bersama-sama, terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan

$$H_0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \text{salah satu koefisiennya } \beta \neq 0$$

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian data dan pembahasan terhadap hasil penelitian antara variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini berarti pemerintah dapat dikatakan konsisten dalam melakukan upaya dalam menaikkan PAD seiring dengan semakin tingginya pembiayaan dan pembelanjaan daerah sehingga perlu upaya peningkatan pendapatan agar keuangan daerah membaik. PAD kabupaten Pesisir Selatan yang salah satunya bersumber dari pajak daerah yang mencapai target setiap tahunnya.
2. Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Semakin tinggi retribusi daerah maka PDRB kabupaten Pesisir Selatan akan semakin meningkat.
3. Pendapatan lain-lain yang sah berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Tidak signifikan ini kemungkinan disebabkan karena data pada penelitian berfluktuasi, dan tidak mengalami perubahan yang cukup berarti.
4. Secara bersama-sama pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah terhadap PDRB ($\text{Prob} = 0.0000$) dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9131. Sehingga ketiga faktor tersebut memiliki sumbangan terhadap kabupaten Pesisir Selatan sebesar 91.31%. Semakin pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah maka secara bersama-sama akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi kabupaten Pesisir Selatan. Berarti sisanya sebesar 8,69% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

B. Saran

Dari simpulan tersebut dapat penulis kemukakan beberapa saran-saran yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan perekonomian kabupaten Pesisir Selatan, maka penulis menyarankan agar pemerintah tetap mengoptimalkan dalam menaikkan PAD seiring dengan semakin tingginya pembiayaan dan pembelanjaan daerah sehingga perlu upaya peningkatan pendapatan agar keuangan daerah terus membaik.
2. Dengan adanya pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan perekonomian kabupaten Pesisir Selatan, maka pemerintah hendaknya lebih dapat memberikan dana kepada daerah-daerah yang membutuhkan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Pesisir Selatan.
3. Dengan adanya pengaruh pendapatan lain-lain yang sah terhadap pertumbuhan perekonomian kabupaten Pesisir Selatan, maka peneliti menyarankan kepada pemerintah perlunya pemberian dana yang secara merata oleh pemerintah, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Pesisir Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Sritua. 2000. *Teori dan Kebijakan Pembangunan*. Jakarta : Penerbit PT Pustaka Cidesindo.
- Ferdian, Yuriko. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah*. Jurnal. FE UNP
- Fisanti, Atni, 2013. 'Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Rokan Hulu.' Jurnal Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Pengaraian. www.e-journal.upp.ac.id. Diakses pada 13 Mei 2015
- Hirawan, Susiyati B., 2005, "*Pembiayaan Pembangunan Daerah*", Dalam Arsyad Anwar (Editor), *Prospek Ekonomi Jangka Pendek dan Sumber Pembiayaan Pembangunan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Idris. 2010. *Pelatihan Analisis SPSS*. Himpro Manajemen Fakultas Ekonomi UNP: Padang
- Izatul. 2011. *Pengaruh dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dan pekerja terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2007-2009*
- Jhingan, M.L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kuncoro, M., 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah, "Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang"*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Mankiw, Gregoey N. 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, terjemahan Imam Nurmawan, SE. Nachrowi
- Mulyanto.2002. "*Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Dikawasan Subosuka Wonosraten Propinsi Jawa Tengah*". Jurnal Akuntansi Sektor Publik
- Musgrave, Richard A. and Musgrave, Peggy B.200, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, (terjemahan), Penerbit Erlangga
- Nachrowi Djalal, Hardius Usman. 2002. *Penggunaan Teknik Ekonometrik , Pendekatan Populer dan Praktis Dilengkapi Teknik Analisis dan Pengolahan Data Dengan menggunakan Paket Program SPSS*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Sianturi, 2008. *Pengaruh PAD terhadap PDRB Kabupaten Dairi dari tahun 1986 sampai tahun 2004*
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta : ALFABETA
- Tambunan, Tulus T.H. 2003. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Salemba Empat